

LAMPIRAN

PERMOHONAN KUESIONER PENELITIAN (SKRIPSI)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH,
PEMAHAMAN AKUNTANSI, KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI PADA BAPENDA PROVINSI LAMPUNG)**



Oleh : Ayu Retno Fitriani

1812120003

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS

DARMAJAYA BANDAR LAMPUNG

2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH,
PEMAHAMAN AKUNTANSI, KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI PADA BAPENDA PROVINSI LAMPUNG)**

Kuesioner ini digunakan dalam penelitian skripsi yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor yang dikaji meliputi:

1. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah** – Menilai sejauh mana kebijakan akuntansi diterapkan untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan.
2. **Pemahaman Akuntansi** – Mengukur sejauh mana pemahaman terhadap peraturan pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. **Ketaatan pada Peraturan Perundangan** – Mengidentifikasi kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan.
4. **Pengendalian Akuntansi** – Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam proses pengambilan keputusan.
5. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** – Mengukur keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program, kebijakan, serta transparansi dalam penyusunan laporan.

Melalui kuesioner ini, responden diharapkan memberikan jawaban yang mencerminkan pengalaman mereka dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintahan. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah.

Hormat Saya,

Ayu Retno Fitriani

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Pendidikan Terakhir :

<input type="checkbox"/> SMA/SMK	<input type="checkbox"/> S1
<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> S2
<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan	
4. Usia :

<input type="checkbox"/> <25 tahun	<input type="checkbox"/> 31-45 tahun
<input type="checkbox"/> 26-30 tahun	<input type="checkbox"/> >46 tahun
5. Jabatan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Memberi Tanda checklist (\checkmark) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
3. Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - a. STS = Sangat Tidak Setuju (1)
 - b. TS = Tidak Setuju (2)
 - c. N = Netral (3)
 - d. S = Setuju (4)
 - e. SS = Sangat Setuju (5)

A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah saya menggunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan SAPD					
2.	Bukti memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan bukti yang saya gunakan dalam pencatatan transaksi keuangan					
3.	Saya mengimplementasikan empat prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset					
4.	Dalam melakukan pencatatan saya melampirkan bukti pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan prosedur penerimaan kas					
5.	Saya mencatat bukti transaksi dan menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan					
6.	Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus					

	Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.				
--	---	--	--	--	--

B. Pemahaman Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan.					
2.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.					
3.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan komponen-komponen laporan keuangan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.					
4.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber					

	<p>daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.</p>					
5.	<p>Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010</p>					
6.	<p>Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No.3 yaitu menyajikan laporan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan keuangan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.</p>					
7.	<p>Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.</p>					
8.	<p>Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No. 6 yaitu disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset dan kewajiban dan ekuitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010</p>					

9.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan PSAP No. 7 yaitu suatu asset dapat diakui jika memenuhi definisi dan kriteria dari pengakuan asset yang ada dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.					
10.	Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan dari entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut penyataan SAP agar mencerminkan satu kesatuan entitas.					

C. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik saya mentaati peraturan perundangan yang berlaku					
2.	Bagi pejabat penanggungjawaban yang tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).					
3.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.					
4.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
5.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur Permendagri No. 21					

	Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah					
--	--	--	--	--	--	--

D. Pengendalian Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
2.	Evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
3.	Penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
4.	Rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					

E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4.	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					

5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ALIAN JAYA NEGARA
2. Jenis Kelamin : L P
3. Pendidikan Terakhir :
- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SMA/SMK | <input type="checkbox"/> S1 | <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan |
| <input type="checkbox"/> D3 | <input type="checkbox"/> S2 | |
4. Usia :
- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> < 25 tahun | <input checked="" type="checkbox"/> 31-45 tahun |
| <input type="checkbox"/> 26-30 tahun | <input type="checkbox"/> > 46 tahun |
5. Jabatan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Mohon Memberi tanda checklist () pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
- Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
- Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - STS = Sangat Tidak Setuju (1)
 - TS = Tidak Setuju (2)
 - N = Netral (3)
 - S = Setuju (4)
 - SS = Sangat Setuju (5)

A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah saya menggunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan SAPD					✓
2.	Bukti memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan bukti yang saya gunakan dalam pencatatan transaksi keuangan					✓
3.	Saya mengimplementasikan empat prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset					✓
4.	Dalam melakukan pencatatan saya melampirkan bukti pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan prosedur penerimaan kas					✓
5.	Saya mencatat bukti transaksi dan menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan					✓
6.	Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.					✓

B. Pemahaman Akuntansi

17/11
15/00/12

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan.					✓
2.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.					✓
3.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan komponen-komponen laporan keuangan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.					✓
4.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.					✓
5.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010					✓
6.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di					

C. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik saya mentaati peraturan perundangan yang berlaku					✓
2.	Bagi pejabat penanggungjawaban yang tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).					✓
3.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.			✓		
4.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				✓	
5.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah				✓	

D. Pengendalian Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					✓
2.	Evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	
3.	Penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	
4.	Rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	

E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.				✓	
2.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin				✓	
3.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.				✓	
4.	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.				✓	
5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.				✓	
6.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan				✓	
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.				✓	
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.				✓	
9.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.				✓	
10.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.				✓	

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : HANAFI, SE. M.Si
2. Jenis Kelamin : L^P
3. Pendidikan Terakhir :
- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> SMA/SMK | <input type="checkbox"/> S1 | <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan |
| <input type="checkbox"/> D3 | <input checked="" type="checkbox"/> S2 | |
4. Usia :
- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> < 25 tahun | <input type="checkbox"/> 31-45 tahun |
| <input type="checkbox"/> 26-30 tahun | <input checked="" type="checkbox"/> > 46 tahun |
5. Jabatan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Mohon Memberi tanda checklist (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
- Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
- Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - STS = Sangat Tidak Setuju (1)
 - TS = Tidak Setuju (2)
 - N = Netral (3)
 - S = Setuju (4)
 - SS = Sangat Setuju (5)

A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah saya menggunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan SAPD					✓
2.	Bukti memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan bukti yang saya gunakan dalam pencatatan transaksi keuangan					✓
3.	Saya mengimplementasikan empat prosedur dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain aset					✓
4.	Dalam melakukan pencatatan saya melampirkan bukti pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan prosedur penerimaan kas					✓
5.	Saya mencatat bukti transaksi dan menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan					✓
6.	Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.					✓

B. Pemahan Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan.					✓
2.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.					✓
3.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan komponen-komponen laporan keuangan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.					✓
4.	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.					✓
5.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010					✓
6.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan di					

C. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik saya mentaati peraturan perundangan yang berlaku					✓
2.	Bagi pejabat penanggungjawaban yang tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).					✓
3.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.					✓
4.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur PP No. 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					✓
5.	Dalam pembuatan laporan keuangan saya menggunakan prosedur Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah					✓

D. Pengendalian Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	
2.	Evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	
3.	Penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	
4.	Rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				✓	

E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pertanyaan	STS	TS	NS	S	SS
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					✓
2.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					✓
3.	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					✓
4.	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					✓
5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					✓
6.	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					✓
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					✓
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					✓
9.	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					✓
10.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					✓



Bandar Lampung, 30 Desember 2021

Nomor : Izin Penelitian.138/DMJ/DEKAN/BAAK/XII-21
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung
Di -

Jl. P. Tirtayasa, Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan dengan peraturan Akademik Institut Bisnis dan Informatika (IBI) bahwa mahasiswa/i Strata Satu (S1) yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja dengan Melaksanakan Penelitian dan membuat laporan yang waktunya disesuaikan dengan kalender Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya.

Untuk itu kami mohon kerja sama Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima mahasiswa/i untuk melakukan Penelitian, yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal **05 Januari 2022 s.d 20 Januari 2022** (selama dua minggu).

Adapun mahasiswa/i tersebut adalah :

Nama : Ayu Retno
NPM : 1812120003
Jurusan : S1 Akuntansi
Jenjang : Strata Satu (S1)

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis,

Ami
Dr. Fauzan I Santi Singagerda, SE., M.Sc
NID. 30040419

Tembusan:

1. Jurusan S1 Akuntansi
2. Arsip.



Jalan Z.A. Pagar Alam, No.93, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung



www.darmajaya.ac.id
info@darmajaya.ac.id



0721-787214
0721-700261